BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2022

KEPAHIANG

SELASA, 10 MEI 2022

SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [x] NETRAL [ ] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

Bola Panas Fulus BKD

JIKA melihat belanja di BKD secara global dalam kurun 3 tahun terakhir secara umum memang mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 lalu total belanja BKD yang tercantum dalam SIRUP LKPP sebesar Rp 14 miliar. Tahun 2021 meningkat menjadi Rp 29,7 miliar dan tahun ini meledak menjadi Rp 170,4 miliar.

Anggaran logistik kantor BKD Kabupaten Kepahiang juga terus mengalami peningkatan. Seperti di 2020 lalu anggaran penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor hanya senilai Rp 522,5 juta. Kemudian mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar Rp 1,22 miliar. Sekarang penyediaan logistik kantor naik menjadi Rp 1,26 miliar.

Angka pagu anggaran dan belanja yang terus mengalami peningkatan ini mendapatkan sorotan serius dari DPRD Kabupaten Kepahiang. Pasalnya justru di tengah kondisi keuangan daerah yang carut marut akibat wabah Covid-19 (refocusing anggaran, red) ditambah lagi dengan defisit anggaran yang terjadi di tahun sebelumnya, anggaran di BKD justru meningkat dengan pesat sejak 2 tahun terakhir.

Bola panas mengenai pembengkakan anggaran di BKD Kabupaten Kepahiang terus bergulir. Setelah sebelumnya Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU mengatakan bahwa penganggaran merupakan hasil pembahasan dewan, saat ini balik DPRD Kepahiang yang melemparkan bola panas itu kepada pihak eksekutif.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kepahiang, Hendri, A.Md mengatakan memang benar sesuai dengan fungsinya dewan yang melakukan pembahasan anggaran. Namun dalam pembahasan tersebut telah disesuaikan dengan usulan yang disampaikan pihak eksekutif.

"Kami selaku panitia anggaran DPRD melakukan pembahasan atas pengajuan dari pihak eksekutif, sesuai dengan perencanaan yang telah disusun oleh mereka dan kebetulan anggarannya ada. Jadi tidak mungkin kami menganggarkan melebihi usulan perencanaan eksekutif," terang Hendri.

Ia mengatakan, pembahasan yang dilakukan Banggar telah sesuai dengan perencanaan yang disampaikan pihak eksekutif. Mulai dari usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan sudah dilakukan pembahasan secara detail.

"Setiap item-item yang ingin dibelanjakan sudah tertera semua dalam usulannya. Berarti mereka ini sangat penting menggunakan anggaran ini, makanya kami anggarkan di Banggar," tegas Hendri.

Terkait adanya anggaran pengadaan logistik kantor yang membengkak menjadi Rp 1,2 miliar di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang, Hendri menambahkan pihaknya selaku Banggar tidak mengetahui persis apakah wajar atau tidak, karena mungkin selama ini selama bertahun-tahun nilai anggarannya memang seperti itu.

"Kami beranggapan dalam pembahasan anggaran sebelumnya, bahwa mungkin memang kebutuhan anggaran untuk logistik kantor memang senilai itu. Makanya tetap kami anggarkan sebesar itu," tambah politisi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut Hendri mengatakan, jika memang anggaran tersebut dinilai meragukan, ia berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut anggaran yang ada di BKD tersebut. "Kami minta APH bisa mengusut anggaran di BKD tersebut. Biar tidak ada rumor yang berkembang soal pembengkakan anggaran yang terjadi di BKD," demikian Hendri.

Diketahui sebelumnya, terkait anggaran belanja di BKD Kabupaten Kepahiang yang membengkak mencapai Rp 170,4 miliar. Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU mengklaim bahwa jumlah tersebut masih dalam kewajaran.

Menurut Bupati, dalam pagu anggaran tersebut ada penggunaannya untuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Ia mengatakan hingga saat ini Pemkab Kepahiang sudah sangat terbuka terkait pengelolaan keuangan, bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru saja melakukan audit terhadap seluruh laporan keuangan, ditambah lagi dalam beberapa tahun ini Kabupaten Kepahiang selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

"Kita baru selesai pemeriksaan BPK ini, dan kita pastikan selama ini pengelolaan keuangan kita selalu wajar," jelas Bupati.

Ia juga menegaskan, sangat gampang untuk menjelaskan soal kenapa anggaran di BKD terkesan membengkak. Menurutnya dalam setiap pengesahan anggaran pemerintah, dilakukan oleh Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang.

"Karena anggaran itu disahkan oleh Banggar. Dan dalam pembahasannya pun dilakukan dengan detail," beber Bupati.

Diketahui sebelumnya, dari total anggaran yang tercantum di website SIRUP-LKPP tersebut, ada beberapa item anggaran yang menarik perhatian, seperti Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan senilai Rp 119,3 miliar, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Rp 23,3 miliar, serta Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 1,2 miliar.

Terkhusus anggaran Dana Darurat yang Rp 23,3 miliar, dimana di dalamnya ada anggaran untuk pembayaran Surat Pengakuan Hutang (SPH) senilai Rp 21 miliar, Bupati mengklaim hal itu masih dalam kewajaran. Karena SPH wajib dibayar lantaran merupakan hak pihak rekanan yang menyele-